



Izinkan TKD untuk Selesaikan Sampah

TPST Piyungan Dibuka tapi dengan Pembatasan

JOGIA - Penutupan TPST Piyungan, Bantul, akan berakhir hari ini (5/9). Pembuangan sampah dibuka kembali dengan pembatasan kuota. Meski kebijakan ini sudah berjalan, skema pembatasan tetap dilanjutkan.



Baca *Izinkan...* Hal 7



Izinkan TKD untuk Selesaikan Sampah

Sambungan dari hal 1

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X meminta wilayah Kartamantul (Jogjakarta, Sleman dan Bantul) tetap melakukan desentralisasi mandiri. Ia mengatakan, kebijakan setelah 5 September pembuangan sampah ke TPST Piyungan bisa dibuka. Piyungan tetap bisa menampung sampah, namun terbatas. "Loh kita tetap bisa dibuka, tetap bisa menampung tapi terbatas," katanya saat ditemui di Kompleks Kepatihan Jogia, kemarin (4/9). "Pembatasan sampah yang masuk ke TPST Piyungan itu sebanyak 180 ton per hari, di antaranya Kota Jogja 100 ton per hari, sisanya Bantul dan Sleman. Kabupaten dan kota diminta masih harus menyelesaikan sampah yang diolah di masing-masing wilayah.

Raja Keraton Jogja ini menilai persoalan pengolahan sampah menjadi tanggung jawab wilayah kabupaten maupun kota. "Karena sampah *kan* wewenang kabupaten kota, bukan provinsi. Provinsi *kan* hanya memfasilitasi," ujarnya. Namun demikian, HB X tak hanya tinggal diam. Tanah Kasultanan yang dikelola desa atau tanah kas desa (TKD) diizinkan untuk menyelesaikan masalah sampah. Baik untuk pembuangan sampah sementara maupun proses pengolahan sampah. "Kami sudah mengizinkan beberapa TKD untuk berproses menyelesaikan masalah sampah. Karena kita sudah memberikan lahan, sekarang sudah berproses," jelasnya. Ayah lima puteri itu telah memberikan lahan kasul-



tanan yang dikelola desa di setiap kabupaten, termasuk Kota Jogja. Diharapkan lahan itu tidak hanya dimanfaatkan, salah satunya mengatasi darurat sampah. Sehingga, sebagian TKD akan jadi tempat untuk memproses pengolahan sampah maupun pembuangan sampah di wilayah. Dengan jumlah keluasan masing-masing. "Tapi semuanya *kan* baru kira-kira akhir tahun. Akhir tahun peralatan dan sebagainya baru datang," terangnya. Kendati begitu, operasionalnya baru optimal sekitar akhir tahun ini. Sebab, baru tahap persiapan pengadaan alat pengolah sampah. Seperti Kabupaten Bantul akan memulai pengolahan pada Desember mendatang dengan pengadaan dua mesin pengolah sampah. Di mana setiap mesin akan dapat mengelola sampah 40-60 ton per hari. Asumsi dengan dua mesin berarti sampah yang diolah per hari mencapai 80 ton. "Kota juga pesan dua alat masing-masing 60 ton, berarti 120 ton. Demikian juga Sleman, semua berproses. Ini *kan* butuh anggaran tidak sekali jadi. Sampai tiga tahun untuk nambah mesin sesuai dengan sampah yang ada," bebarnya. Meski pembuangan sampah dibatasi ke TPST Piyungan, HB X berupaya membiasakan wilayah mandiri dalam penge-

lolaannya. Karena pembatasan akan berlanjut, tak hanya untuk jangka pendek melainkan jangka panjang. Sehingga wilayah Kartamantul tidak terlena dengan TPST Piyungan, mengingat saat ini sudah mulai melebihi kapasitas. "Nanti semua djolah di kabupaten, bukan di Piyungan lagi. Memang tanggung jawab mereka. *Mengko nek soyo nganu tak tutup meneh. Nek ora dipeksa ora mlaku* (nanti kalau tidak dipaksa, tidak jalan) itu *aja*," tambahnya. Sebelum darurat sampah ini, wilayah kabupaten/

kota dianggap masih manja dan belum serentak desentralisasi. "Kalau sekarang melakukan (pengolahan mandiri) *kan* nyatanya bisa, akhirnya mau investasi alat. *Kan* gitu, yang tadinya *opo opo* Piyungan-Piyungan," tambahnya. (wia/laz/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005